

Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Ulfa^{1*}, Felmi D. Lantowa², Lukfiah Irwan Radjak³

¹⁻³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author ✉ pagodjaulfa@gmail.com

Abstract

In order to achieve the economic development of a country, financing is needed with a fair, transparent and efficient financial distribution system. So it is very important for local governments to pay great attention to the performance of regional financial management. The purpose of this study is based on the formulation of the problems previously mentioned, namely to find out and identify how the ratio of regional financial performance in Gorontalo Regency is. The results of the study show that the ratio of regional financial performance in Gorontalo Regency during the period 2017-2021 shows that all financial ratios have decreased from 2017 to 2020. Then in 2021, it begins to experience improvements in terms of increasing financial performance when viewed from various financial ratios. So that the Gorontalo Regency Government must be able to maximize the potential that exists in the region to be able to improve financial performance which is generally lower than 2017.

Keywords: *Financial Performance, Regional Original Income, Financial Ratios*

Abstrak

Dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi suatu negara maka diperlukan pembiayaan dengan system pembagian keuangan yang adil, transparan dan efisien. Sehingga sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya yaitu Untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana rasio kinerja keuangan daerah di Kabupaten Gorontalo. Hasil Penelitian menunjukkan rasio kinerja keuangan daerah di Kabupaten Gorontalo selama periode 2017 – 2021 menunjukkan bahwa seluruh rasio keuangan mengalami penurunan sejak tahun 2017 sampai tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 mulai mengalami perbaikan dalam hal peningkatan kinerja keuangan jika dilihat dari berbagai rasio keuangan. Dari 5 rasio yang di ambil terdapat 3 rasio yang efektif dan 2 rasio yang tidak efektif Sehingga Pemerintah Kabupaten Gorontalo harus dapat memaksimalkan potensi yang ada di daerah untuk dapat memperbaiki kinerja keuangan yang secara umum lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Pendapatan Asli daerah, Rasio Keuangan



Under the License CC BY-SA 4.0

Copyright© 2025, 'Alamiy: Jurnal Babasa dan Sastra Arab

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar penting dalam pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional, khususnya dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan. Prioritas tersebut ditetapkan berdasarkan tantangan dan arah kebijakan pembangunan baik jangka pendek maupun jangka menengah (Propenas, 2014). Bagi negara berkembang seperti Indonesia, tantangan pembangunan juga mencakup kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif sehingga mampu menopang pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Krisis ekonomi 1997 menjadi titik balik penting dalam tata kelola keuangan nasional. Ketika pemerintah tidak mampu membiayai berbagai program pembangunan akibat melemahnya pendapatan, ketahanan ekonomi nasional pun ikut terguncang. Muhadam (2015) menegaskan bahwa kondisi tersebut memperlebar kesenjangan antar daerah dan menguatkan kebutuhan desentralisasi. Melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, pemerintah daerah diberi kewenangan luas dalam perencanaan serta pengelolaan keuangan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran serta membuka kesempatan bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi keuangan lokal sebagai penopang pembangunan.

Penguatan pengelolaan keuangan daerah semakin dipertegas melalui Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan tersebut ditekankan bahwa pengelolaan keuangan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kinerja. Keberhasilan tata kelola keuangan daerah dapat diukur melalui analisis rasio keuangan pada APBD, yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta tingkat kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan.

Pembiayaan pembangunan yang baik menuntut adanya pengelolaan keuangan yang adil, efisien, serta transparan. Apabila anggaran dikelola dengan baik, pertumbuhan ekonomi daerah dapat muncul secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat (Masihad, 2018). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu memastikan bahwa setiap proses penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan dijalankan sesuai prinsip good governance. Pada konteks Provinsi Gorontalo, perhatian terhadap pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin penting ketika daerah menghadapi berbagai tantangan seperti melemahnya aktivitas ekonomi dan dampak pandemi COVID-19.

Data Statistik Keuangan (2020) menunjukkan bahwa meskipun total pendapatan Kabupaten Gorontalo meningkat dari tahun 2017 hingga 2020, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru berfluktuasi. Pada tahun 2017 PAD sebesar Rp190,428,308; turun pada 2018 menjadi Rp147,992,401; kemudian naik menjadi Rp155,465,564 pada 2019; dan kembali meningkat menjadi Rp175,765,940 pada 2020. Kenaikan ini bersifat perlahan dan belum cukup memperkuat posisi keuangan daerah. Selain itu, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan yang mencapai 66,80% dari total pendapatan tahun 2020, sementara PAD hanya berkontribusi 11,70% dan pendapatan lain yang sah sebesar 21,50%. Kondisi ini menandakan tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2017 -2020

Jenis Pendapatan Pemerintah	Realisasi Pendapatan Pemerintah (Juta Rupiah)			
	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp.190.428.308	Rp.147.992.401	Rp.155.465.564	Rp.175.765.940
Pajak Daerah	Rp.22.180.564	Rp.27.456.459	Rp.31.295.613	Rp.40.688.657
Retribusi Daerah	Rp.5.940.900	Rp.9.099.112	Rp.5.306.381	Rp.6.530.990
Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah	Rp.2.921.391	Rp.4.581.761	Rp.5.453.911	Rp.5.453.911
Lain-lain PAD Yang Sah	Rp.159.385.453	Rp.106.855.069	Rp.113.409.659	Rp.123.092.382
DANA PERIMBANGAN	Rp.866.050.166	Rp.1.002.264.189	Rp.988.549.823	Rp.1.002.855.231
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Rp.12.703.066	Rp.10.620.146	Rp.10.791.585	Rp.10.627.666

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	Rp.202.994.401	Rp.306.795.807	Rp.355.139.218	Rp.322.737.331
Pendapatan Hibah	Rp.6.500.277	Rp.54.823.200	Rp.60.506.483	Rp.56.154.151
Dana Darurat	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.37.094.340	Rp.38.023.438	Rp.45.195.760	Rp.43.298.261
Dana Penyesuaian dan Otonomi KHUSUS	Rp.157.372.168	Rp.211.949.169	Rp.248.935.865	Rp.223.284.911
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.2.025.544	Rp.2.000.000	Rp.500.000	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.2.072	-	Rp.1.110.000	
JUMLAH	Rp.1.259.472.875	Rp.1.457.052.397	Rp.1.499.154.605	Rp.1.501.358.501

Sumber: Hasil Olah Data, 2022

Meskipun laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pelaksanaan anggaran pada tahun 2020 mengalami pergeseran dan refocusing untuk penanganan COVID-19 (Pomalingo, 2021 dalam read.id). Perubahan tersebut menyebabkan pencapaian kinerja keuangan tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo menjadi sangat penting untuk mengetahui sejauh mana daerah telah mengelola anggaran secara efektif dalam menghadapi dinamika ekonomi dan perubahan kebijakan.

Berdasarkan berbagai persoalan dan dinamika tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui indikator rasio keuangan, mengidentifikasi tingkat kemandirian daerah berdasarkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan, serta menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi keuangan daerah dan menjadi dasar pertimbangan dalam perbaikan kebijakan pengelolaan keuangan di masa mendatang.

B. Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gorontalo selama 90 hari, yakni pada periode Agustus–November 2022. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan tujuan menggambarkan kinerja keuangan daerah secara objektif melalui pengolahan data numerik pada dokumen keuangan pemerintah daerah. Metode deskriptif dipilih karena berfokus pada pemaparan kondisi aktual berdasarkan fakta yang dihimpun dari sumber data yang tersedia (Sugiyono, 2012). Variabel penelitian dioperasionalkan dalam lima indikator rasio keuangan daerah, yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kesenjangan, dan Rasio Pertumbuhan. Rasio Kemandirian digunakan untuk menilai tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendanaan eksternal; Rasio Efektivitas mengukur kemampuan merealisasikan pendapatan sesuai potensi yang ditetapkan (Halim, 2012); Rasio Efisiensi menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan biaya, di mana nilai rasio yang lebih rendah menunjukkan kinerja yang lebih baik (Mardiasmo, 2013). Selanjutnya, Rasio Kesenjangan digunakan untuk menilai komposisi dan prioritas belanja daerah, sedangkan Rasio Pertumbuhan menggambarkan perubahan pendapatan dari tahun ke tahun.

Populasi penelitian mencakup seluruh laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, sementara sampel penelitian ditetapkan secara purposif berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai sumber utama perhitungan rasio. Data diperoleh melalui teknik observasi dan dokumentasi, meliputi laporan keuangan daerah, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, serta dokumen pendukung lain yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan menghitung masing-masing rasio, kemudian menginterpretasikan hasilnya untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja keuangan daerah. Tahapan penelitian meliputi observasi awal, penyusunan rancangan penelitian, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan laporan penelitian hingga tahap akhir.

C. Hasil dan Pembahasan

Rasio Kemandirian

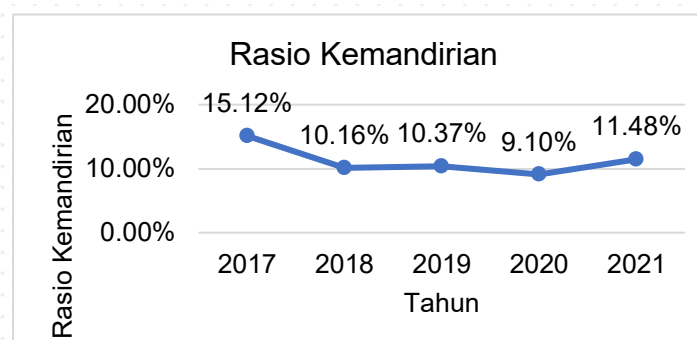
Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian	Ket
2017	Rp.190.428.308	Rp.1.259.472.875	15.12%	Instruktif
2018	Rp.147.992.401	Rp.1.457.052.397	10.16%	Instruktif
2019	Rp.155.465.564	Rp.1.499.154.605	10.37%	Instruktif
2020	Rp.128.153.477	Rp.1.408.587.213	9.10%	Instruktif
2021	Rp.166.605.914	Rp.1.451.878.306	11.48%	Instruktif
Rata-rata	Rp.157.729.132,8	Rp.1.415.229.079	11.15%	Instruktif

Sumber: Hasil Olah Data, 2022

Pada Rasio Kemandirian Kabupaten Gorontalo selama lima tahun berada pada kategori sangat rendah dengan kisaran rata-rata hanya 11,15%. Rasio ini dihitung berdasarkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Kemandirian keuangan yang rendah tersebut menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah masih jauh dari memadai.

Kondisi ini menggambarkan bahwa pemerintah Kabupaten Gorontalo masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk mendanai sebagian besar program dan kegiatan pemerintahan. Bahkan pada tahun 2020, rasio ini mencapai titik terendah sebesar 9,10%, menandakan semakin kecilnya kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan sendiri tanpa bantuan pusat. Ini sejalan dengan pernyataan Halim (2012) yang menyebutkan bahwa rasio di bawah 25% menggambarkan pola hubungan instruktif, di mana pemerintah pusat lebih dominan mengatur karena daerah belum mandiri dalam fiskal.



Sumber: Hasil Olah data, 2022

Gambar 1. Rasio Kemandirian

Fluktuasi PAD dari tahun ke tahun juga memperlihatkan bahwa daerah belum mampu memaksimalkan potensi pendapatannya. Meskipun terdapat upaya peningkatan penerimaan dari sektor-sektor PAD seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, namun peningkatan tersebut masih belum signifikan dibandingkan dengan besarnya dana transfer yang diterima. Penelitian terdahulu yang dilakukan di Kota Medan menunjukkan rasio kemandirian yang jauh lebih tinggi, mencapai rata-rata 36,80% bahkan dengan tren yang terus meningkat setiap tahun. Jika dibandingkan dengan daerah tersebut, Kabupaten Gorontalo masih memiliki kesenjangan besar dalam kemampuan menciptakan pendapatan asli secara mandiri.

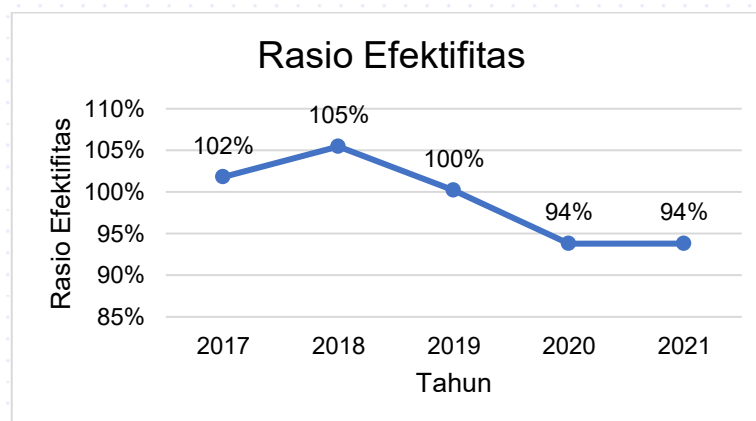
Rasio Efektifitas

Tabel 3. Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Rasio Efektifitas	Ket
2017	Rp.1.259.472.875	Rp.1.237.243.997	102%	Efektif
2018	Rp.1.457.052.397	Rp.1.381.594.498	105%	Efektif
2019	Rp.1.499.154.605	Rp.1.496.156.132	100%	Efektif Berimbang
2020	Rp.1.408.587.213	Rp.1.501.358.507	94%	Tidak Efektif
2021	Rp.1.361.878.306	Rp.1.451.878.306	94%	Tidak Efektif
rata-rata	Rp.1.397.229.079	Rp.1.413.646.288	99.02%	Tidak Efektif

Sumber: Hasil Olah Data, 2022

Pada Rasio Efektivitas, kondisi Kabupaten Gorontalo selama 2017–2021 menunjukkan kinerja yang berfluktuasi dan tidak konsisten. Pada tahun 2017 efektivitas berada pada angka 102%, dan di tahun 2018 meningkat menjadi 105%, yang berarti pemerintah berhasil melampaui target PAD yang telah ditetapkan. Namun, capaian tersebut tidak dapat dipertahankan. Rentang tahun 2020 hingga 2021 menunjukkan penurunan efektivitas yang cukup signifikan, sehingga rasio menjadi 94% dan masuk ke dalam kategori tidak efektif. Rendahnya efektivitas pada dua tahun terakhir tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kemampuan SDM dalam pemungutan pajak yang masih terbatas, kurangnya sarana prasarana, hingga rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.



Sumber: Hasil Olah data, 2022

Gambar 2. Rasio Efektifitas

Selain itu, kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang melemah turut memberikan dampak terhadap sektor-sektor yang menjadi sumber PAD, seperti pajak restoran, hotel, dan jasa lainnya. Ketika daya beli menurun, perputaran ekonomi pun melambat sehingga pendapatan dari sektor pajak ikut terpengaruh. Hal ini selaras dengan teori bahwa efektivitas pendapatan PAD sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dibandingkan penelitian-penelitian sejenis di Kota Malang, Tangerang, Manado, dan Sumatera Barat, efektivitas Kabupaten Gorontalo jauh lebih rendah, karena daerah-daerah tersebut mampu mempertahankan efektivitas di atas 105% setiap tahun.

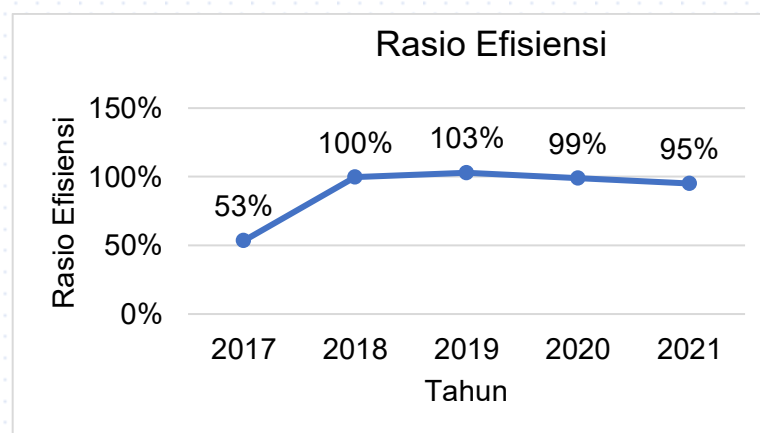
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tabel 4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio efisiensi	Ket
2017	Rp.671.893.453	Rp.1.259.472.875	53%	Efisien
2018	Rp.1.451.790.060	Rp.1.457.052.397	100%	Efisien Berimbang
2019	Rp.1.542.630.737	Rp.1.499.154.605	103%	Tidak Efisien
2020	Rp.1.392.206.507	Rp.1.408.587.213	99%	Efisien
2021	Rp.1.293.956.745	Rp.1.361.878.306	95%	Efisien
Rata-rata	Rp.1.270.495.500	Rp.1.397.229.079	90%	Efisien

Sumber: Hasil Olah Data, 2022

Pada Rasio Efisiensi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Gorontalo cukup berhasil dalam mengelola biaya untuk menghasilkan pendapatan. Dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 90%, hal ini berarti pemerintah daerah telah mampu meminimalkan biaya pemungutan pendapatan secara efektif. Menurut Mardiasmo (2013), semakin kecil nilai rasio efisiensi maka semakin baik kinerja pengelolaan anggaran daerah. Dengan demikian, rasio 90% yang diperoleh Kabupaten Gorontalo menandakan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan yang berhasil dikumpulkan. Kondisi ini merupakan salah satu aspek positif yang perlu dipertahankan, meskipun besarnya PAD belum optimal. Efisiensi yang baik menunjukkan bahwa mekanisme operasional dalam pemungutan pendapatan dikelola secara tepat meski menghadapi keterbatasan fiskal.

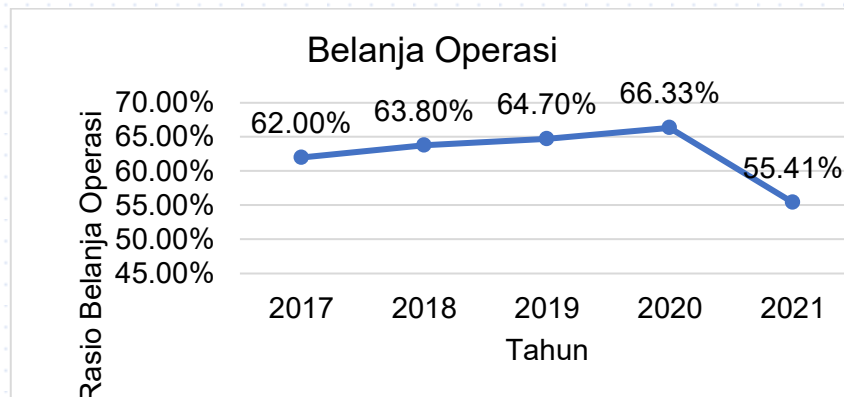


Sumber: Hasil Olah data, 2022

Gambar 3. Rasio Efisiensi

Rasio Keserasian

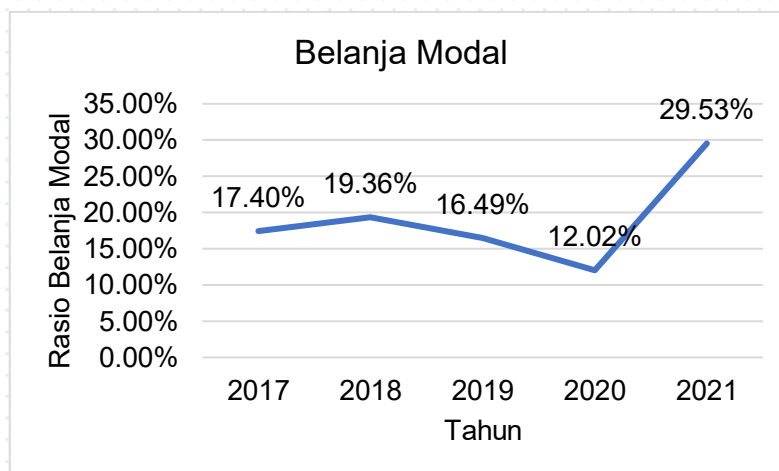
1. Rasio Belanja Operasi



Sumber: Hasil Olah data, 2022
Gambar 4. Rasio Belanja Operasi

Dilihat dari data di atas menggambarkan bahwa rasio belanja operasi daerah mengalami peningkatan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, dimana pada tahun 2017 sebesar 62,00% dan pada tahun 2020 mencapai 66,33%. Dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 55,41%. Hal ini diakibatkan oleh anggaran belanja operasional di alihkan untuk pembiayaan Covid-19. Sehingga terjadi penurunan dalam hal rasio belanja operasi.

2. Rasio Belanja Modal



Sumber: Hasil Olah data, 2021
Gambar 5. Rasio Belanja Modal

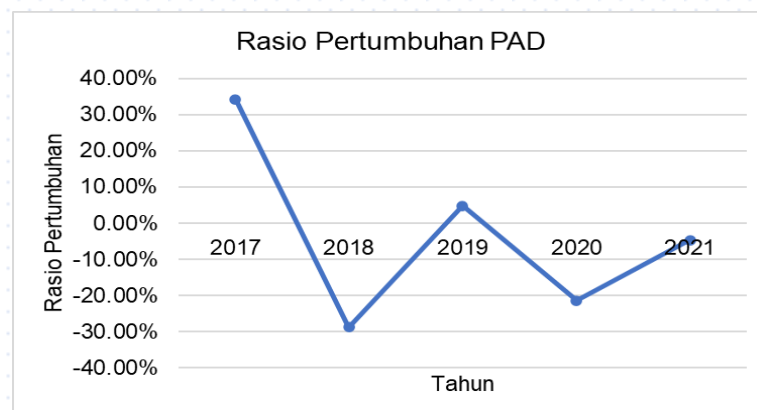
Rasio Pertumbuhan

Tabel 5. Rasio Pertumbuhan Kabupaten Gorontalo Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD $X_n - X_{n-1}$	Realisasi Penerimaan PAD X_n	Rasio Pertumbuhan
2017	Rp.65.157.232	Rp.190.428.308	34.22%
2018	Rp.-42.435.907	Rp.147.992.401	-28.67%
2019	Rp.7.473.163	Rp.155.465.564	4.81%
2020	Rp.-27.312.087	Rp.128.153.477	-21.31%
2021	Rp.-5.685.651	Rp.122.467.826	-4.64%
Rata-rata	Rp.-560.650	Rp.148.901.515	-4.64%

Sumber: Hasil Olah Data, 2022

Rasio Pertumbuhan menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Gorontalo selama 2017–2021 cenderung mengalami pertumbuhan negatif dengan rata-rata -4,64%. Pertumbuhan negatif ini menandakan bahwa PAD pada tahun tertentu lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fluktuasi pendapatan yang tidak stabil menunjukkan bahwa potensi PAD belum sepenuhnya dimanfaatkan dan pemerintah perlu melakukan pembenahan dalam strategi peningkatan pendapatan daerah. Penelitian Arumdari (2019) yang menemukan situasi serupa pada Kota Medan menegaskan bahwa pertumbuhan PAD negatif terjadi akibat tidak maksimalnya realisasi pendapatan, baik karena faktor ekonomis maupun kurangnya optimalisasi potensi pendapatan daerah.



Sumber: Hasil Olah data, 2022
Gambar 6. Rasio Pertumbuhan

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo selama periode 2017–2021 menunjukkan dinamika yang berfluktuasi, di mana beberapa rasio mengalami peningkatan dan sebagian lainnya mengalami penurunan pada 2017–2020, kemudian pada 2021 terlihat adanya kecenderungan perbaikan berdasarkan sejumlah indikator rasio. Mengacu pada lima rasio kinerja keuangan daerah menurut Halim (2012), hasil perhitungan memperlihatkan bahwa Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian Belanja Modal, dan Rasio Pertumbuhan berada pada kategori relatif baik/efisien, sementara Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, serta Rasio Keserasian Belanja Operasi masih menunjukkan kinerja yang kurang baik. Secara khusus, Rasio Kemandirian rata-rata sebesar 11,15% mengindikasikan tingkat kemandirian yang sangat rendah (di bawah 25%), dengan nilai tertinggi pada 2017 sebesar 15,12% namun tetap berada pada pola hubungan instruktif, sehingga menegaskan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Rasio Efektivitas mencapai puncak pada 2018 sebesar 105% dan tergolong efektif pada 2017–2018, tetapi menurun pada 2019–2021 menjadi kurang efektif karena berada di bawah 100%. Rasio Efisiensi menunjukkan kondisi yang cenderung membaik setelah sempat tidak efisien pada 2019 (103%), lalu kembali efisien pada 2020–2021 (99% dan 95%). Pada Rasio Keserasian, belanja operasi cenderung tinggi hingga 2020 namun menurun pada 2021 (55,41%) sehingga masih perlu perhatian, sedangkan belanja modal mengalami perbaikan signifikan pada 2021 (29,53%). Sementara itu, Rasio Pertumbuhan yang sempat berkontraksi pada 2020 (-21,31%) meningkat pada 2021 menjadi -4,64%, menandakan pemulihan meski belum sepenuhnya positif.

Referensi

- BPS. Provinsi Gorontalo. 2020. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo 2020. CV. Rifaldi
- Halim, A. (2012^a). Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat: Jakarta.
- Halim, A (2012^b). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat,
- Halim, A. (2015). Manajemen Keuangan Bisnis konsep dan Aplikasinya. Jakarta:
- Halim, F. (2017), Analisis Laporan keuangan. Bandung Alfabeta Mitra Wacana Media
- Labolo, M. (2015). Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal, Bogor: Ghalia Indonesia,
- Mahmud.i (2019), Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, UPP STIM YKPN: Yogyakarta
- Mardiasmo. (2013). Perpajakan: Edisi Revisi. Andi: Yogyakarta
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:
- Anggraini, R.D. (2015) “Aalisis kemampuan daerah, tingkat kemandirian dan efektivitas realisasi anggaran pemerintah kota tanggerang tahun 2010-2014”.
- Erawati, M. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada Kinerja Keuangan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 14.2. ISSN: 2302-8556.
- Haryanto, A. (2014). “Analisis Efektivitas, Kemandirian Dan Desentralisasi Pemerintah Kota Medan, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Skripsi 2014.
- Kaeng, A.R. “Analisis Pendapatan Asli daerah untuk belanja daerah pada pemerinstah kota tomohon”. Jurnal Emba., Vol. 3 No. 2 Juni (2015), h.960
- Kaunang, C.E. (2016.) Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah pada Kota Manado 2010-2014. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 02 Tahun 2016
- Kusumawardani, Media. (2012). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Accounting Analysis Journal 1
- Mahmudi. (2016) Jurusan Akuntansi Feb Universitas Mataram Analisis Belanja Daerah
- Oesi, A. (2013). Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
- Rindang, A. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera.
- Rochman, S.N. (2015). faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. naska publikasi. universitas muhammadiya Surakarta.
- Sambow, D.F. George M. V. Kawung, Avriano Tenda. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Di Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 02 Tahun 2016
- Saputra, D. “Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat”, Padang: Universitas Negeri Padang, 2014
- Sularso dan Restianto. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat.

- Sundari dan Rr. Suprantiningrum. (2015). analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah di era otonomi daerah (studi kasus kota semarang tahun 2009-2013). Media ekonomi dan manajemen. Vol. 30 no. 1 januari 2015
- Suratno, P.N. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). Skripsi Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Penerimaan Daerah.
- Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- UU RI. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- UU RI. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.